

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI BANTEN
2017-2021**

Khoirul Setiawan

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: 5553220034@untirta.ac.id

Mohammad Haikal

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: 5553220018@untirta.ac.id

Adholf Galih Wicaksana

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: 5553220025@untirta.ac.id

Deris Dermawan

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: derisdermawan@untirta.ac.id

Abstract.

We investigated this as an evaluation of the impact of district/city minimum wages and human development index on the open unemployment rate in Banten Province using quantitative methods with secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) from 2017 to 2021. Multiple regression analysis was used to determine how much influence the independent variables have on the dependent variable. The results show that the HDI and minimum wage variables are not significant in influencing the unemployment rate, although more detailed and complex research is needed for more accurate results. It is hoped that the results of this research can contribute to improving the quality of economic policy in Banten Province.

Keywords: Minimum Wage, Human Development Index, and Unemployment.

Abstrak.

Kami menyelidiki ini dilakukan sebagai evaluasi dampak upah minimum kabupaten/kota dan indeks pembangunan manusia kepada tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 hingga 2021. Analisis regresi berganda dipakai buat menentukan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil riset menampakkan bahwa variabel IPM dan upah minimum tidak signifikan dalam mempengaruhi tingkat pengangguran, meskipun penelitian lebih rinci dan kompleks diperlukan untuk hasil yang lebih akurat. Diharapkan hasil riset ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kebijakan ekonomi pada Provinsi Banten.

Kata kunci: Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pengangguran.

LATAR BELAKANG

Pengangguran selalu menjadi masalah perekonomian serius yang dialami oleh seluruh negara didunia, tanpa terkecuali negara berkembang seperti Indonesia. Sangat disayangkan bahwa Indonesia saat ini memasuki periode bonus demografi yang tinggi, yang diprediksi terjadi antara tahun 2020 hingga 2030 (Konoras et al., 2018). Dalam hal ini juga pengangguran bisa menyebabkan hilangnya barang dan jasa pada suatu perekonomian. Jika saja kesempatan kerja penuh, maka semua faktor produksi digunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dapat menghasilkan jumlah output yang tinggi untuk masyarakat. Namun dengan adanya pengangguran maka akan berakibat sebaliknya. Selain itu, dampak pengangguran sendiri tidak hanya menyebar ke berbagai faktor sumber kehidupan, tetapi juga menyangkut harga diri seseorang hingga mengganggu ketenangan sosial.

Menurut Mankiw pengangguran adalah situasi di mana seseorang ingin mencari pekerjaan di pasar tenaga kerja, tetapi tak berhasil. Insan yang tak bekerja namun tak secara aktif melacak pekerjaan tak dianggap menganggur. Ketidakseimbangan pasar tenaga kerja dapat menyebabkan pengangguran. Ini menunjukkan bahwa besaran tenaga kerja yang diminta kurang dari besaran tenaga kerja yang ditawarkan (Agus Yulistiyono, Endra Gunawan et al., 2021).

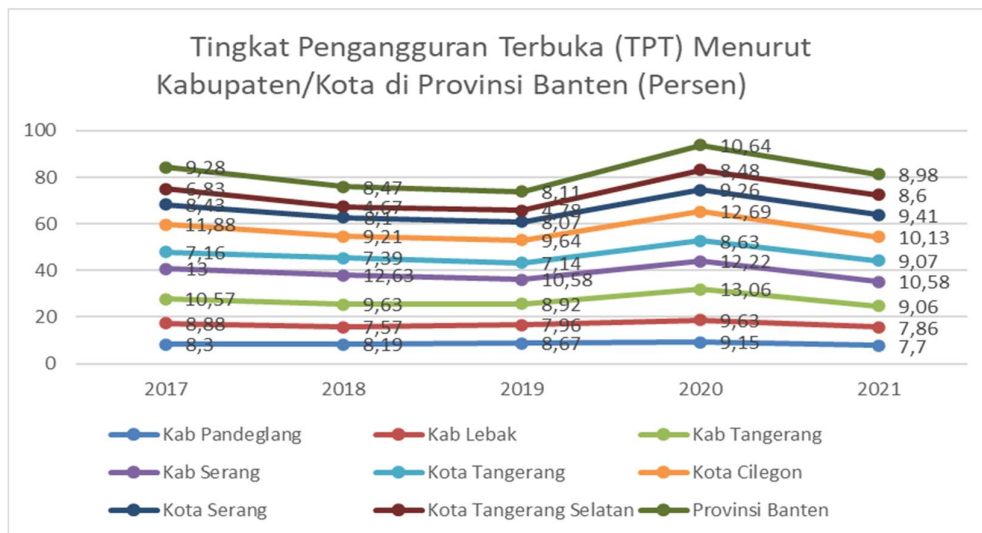
Kesempatan kerja di Indonesia masih rendah dari tahun ke tahunnya karena besaran angkatan kerja lebih tinggi dipadankan dengan kesempatan kerja. Pengangguran adalah kondisi atau kejadian dimana yang tergolong dalam angkatan kerja yang mau memperoleh pekerjaan namun urung mendapatkan pekerjaan yang diinginkan (Sadono Sukirno, 2012).

Tingkat pengangguran merupakan parameter penting dalam perekonomian suatu negara atau daerah. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan tenaga kerja, serta dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Disini kami hendak menelaah mengenai aspek-aspek apa saja yang berpengaruh dengan tingkat pengangguran di wilayah

Provinsi Banten. Tingkat pengangguran di daerah Banten sendiri dari waktu ke waktu mengalami kenaikan secara masif. Besaran penduduk yang terus meningkat tidak dibarengi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada, di wilayah Banten banyak sebagian masyarakat pada Angkatan kerja, namun urung memperoleh pekerjaan yang layak ataupun kerjaan yang pendapatannya kurang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT), yang mengacu pada presentasi jumlah pengangguran dalam kaitannya dengan tenaga kerja, adalah salah satu parameter yang dipakai dalam perhitungan tingkat pengangguran. TPT mencakup orang yang tidak bekerja dan melacak pekerjaan, yang sedang menyiapkan bisnis, yang tidak melacak pekerjaan karena mereka percaya sulit memperoleh pekerjaan, serta orang yang telah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, menurut data dari (Badan Pusat Statistik, 2021).

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan besaran Angkatan kerja di Provinsi Banten pada tahun 2021 sebanyak 5,698,344 juta jiwa, dimana hal itu mengalami kenaikan sebesar 146,172 ribu jiwa dari tahun 2019. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 yaitu 8,98 persen, hal ini mengalami kenaikan yang baik dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020, Tingkat TPT sebanyak 10,64 persen. Berikut ini adalah grafik mengenai tingkat pengangguran terbuka pada Provinsi Banten dari tahun 2017-2021 :

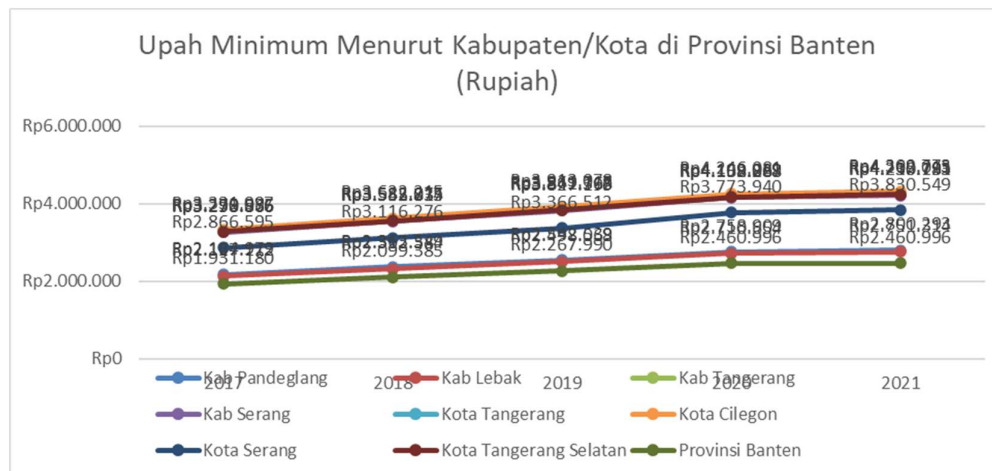


Sumber: Badan Pusat Statistik (2021).

Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kab/Kota di Provinsi Banten

Menurut Grafik 1. TPT yang tertinggi di Provinsi Banten pada tahun 2021 yaitu ada pada Kab. Serang dengan 10,58 persen, Dan yang terendah ada pada Kab. Pandeglang dengan 7,7 persen. Provinsi Banten memiliki tingkat pengangguran terbuka teratas di Indonesia yang disebabkan oleh jumlah penduduk yang numpuk serta menjadi pusat pemerintahan, pusat sekolah, dan pusat industri, sehingga pertarungan dalam melacak pekerjaan sangat ketat. Untuk yang mengalami peningkatan cukup besar dari tahun 2020 ke 2021 ada pada Kab. Tangerang dengan jumlah peningkatan sebesar 4 persen.

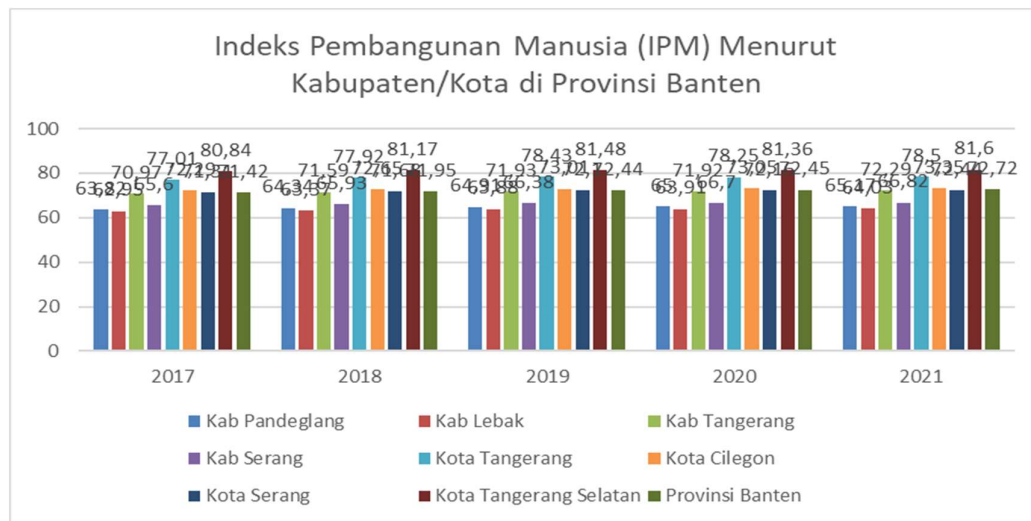
Di Banten, Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya peningkatan jumlah pengangguran terbuka. Salah satu faktornya adalah pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan perluasan angkatan kerja. Di beberapa wilayah, terdapat anak muda yang memasuki dunia kerja, tetapi kurang fokus terhadap pekerjaan mereka. Tantangan global saat ini adalah bagaimana memberikan lapangan kerja yang lebih baik untuk kaum muda.. Namun, banyak yang menganggap juga upah merupakan satu hal yang harus diupayakan dan sesuai dengan regional, jika tidak biasanya orang cenderung malas untuk bekerja. Tenaga kerja amat bergantung pada besaran upah yang dibagikan oleh perusahaan menjadi sumber kebutuhan hidup mereka dan keluarga. Biaya yang tinggi disebabkan oleh tingkat upah yang juga tinggi, sehingga perusahaan cenderung mengurangi jumlah karyawan untuk menekan biaya tersebut. Selama periode 2017-2021, upah minimum di Provinsi Banten terus meningkat (Dita Dewi Kuntiarti, 2018).



Sumber: Badan Pusat Statistik (2021).

Gambar 2. Upah Minimum Menurut Kab/Kota di Provinsi Banten

Berdasarkan Grafik 2, Dari waktu ke waktu upah mengalami peningkatan, walaupun tidak terlalu tinggi, namun selalu naik. Untuk daerah yang mempunyai upah minimum tertinggi di tahun 2021, yaitu Kota Cilegon yaitu dengan Rp. 4.309.773, dan untuk yang terendah ada pada daerah Kab. Lebak dengan upah minimum Rp. 2.751.314. (Prawira, 2018) mengutip Kaufman dan Hotchkiss yang menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara gaji dan pengangguran, di mana beranjak naik besarnya gaji yang ditentukan oleh pemerintah maka semakin rendah besaran orang yang bekerja. Seumpama gaji yang ditetapkan di suatu wilayah terlalu kecil, oleh sebab itu hal ini dapat meningkatkan jumlah pengangguran di wilayah tersebut. Meskipun demikian, dari sudut pandang pengusaha, seumpama upah meningkat dan biaya yang dihabiskan menjadi tinggi, maka pengusaha cenderung mengambil kebijakan untuk mengurangi tenaga kerja dengan tujuan menekan biaya produksi. Keputusan ini kemudian akan berakibat pada peningkatan tingkat pengangguran.. Menurut (Mahroji et al., 2019) Tingkat keberhasilan dalam meningkatkan kualitas manusia mampu dinilai melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ialah sebuah parameter yang menunjukkan kemajuan suatu negara dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selama lima tahun terakhir, IPM di Provinsi Banten menjalani fluktuasi yang terlihat pada grafik 3, yang menunjukkan kenaikan dan penurunan yang terjadi di pemerintahan Provinsi Banten.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2021).

Gambar 3. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kab/Kota di Provinsi Banten

Menurut Grafik 3, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten di tahun 2021 paling besar atau paling tinggi ada pada Kota Tangerang Selatan dengan 81,6, hal inipun terjadi di tahun 2020 dimana Tangsel juga menjadi tertinggi dengan 81,36, naik secara perlahan. Untuk IPM yang rendah di tahun 2021 ada pada Kab. Lebak dengan 64,03, dan biasanya orang dari Kab. Lebak mayoritas bertani dan beternak hewan. Keberhasilan dalam meningkatkan kualitas manusia dapat diukur berdasarkan kemampuan menyelesaikan masalah-masalah mendasar Permasalahan terkait Pembangunan kualitas sumber daya manusia meliputi beberapa faktor seperti sekolah yang tidak selesai, kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan mutu manusia dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, peran penting pemerintah sebagai penyedia fasilitas pembangunan manusia untuk mencapai tujuan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, yang memperhatikan mutu manusia. Dari uraian tersebut, bahasan dalam riset ini adalah buat menyelidiki akibat variabel Upah Minimum maupun IPM kepada tingkat pengangguran pada Provinsi Banten semasa periode 2017-2021. Tujuan dari riset ini adalah untuk menilik betapa Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia mempengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi Banten selama periode tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Tingkat Pengangguran Terbuka

Orang yang tergolong dalam kategori umur kerja atau angkatan kerja adalah mereka yang tidak bekerja semasa masa tertentu, tetapi siap menerima pekerjaan dan sedang giat mencari pekerjaan. (Filiarsari & Setiawan, 2021). Variabel tingkatan pengangguran terbuka dalam riset ini merupakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (dinyatakan dalam satuan persen).

Upah

Dalam pengertian linguistik, upah merujuk pada pembayaran dalam bentuk uang atau barang-barang lain yang diberikan sebagai pengganti jasa atau tenaga yang telah digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan, seperti gaji atau imbalan lainnya. (Saeful

Bahari, 2020). Variabel upah dalam riset ini merupakan upah minimum kabupaten/kota yang legal di Provinsi Banten (dinyatakan dalam satuan rupiah).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (HDI) adalah alat pengukur yang diperuntukkan menilai kinerja rata-rata suatu negara dalam tiga bidang penting: harapan hidup, pendidikan, dan kesehatan (Baeti, 2013).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber data

Pada riset ini, bahan yang dipakai yakni data pihak kedua yang berasal pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2017 - 2021. Bahan yang diamati meliputi bahan pengangguran, upah minimum kabupaten/kota, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Metode Analisis

Teknik analisis data untuk menentukan akibat gaji dan indeks pembangunan manusia (IPM) kepada tingkat pengangguran variabel dependent adalah regresi linier berganda. Penelitian ini pengolahan datanya menggunakan sebuah program yang disebut SPSS (Statistical Package for Sosial Science) versi 22 (Nuradila & Wibowo, 2018).

Analisis regresi linear berganda bermaksud untuk menentukan sejauh mana variabel bebas yang diuji mengakibatkan variabel terikat. Dalam pengolahan data, dapat ditemukan beberapa hasil pengaruh, yaitu: 1) dampak positif dan signifikan, 2) dampak positif namun tidak signifikan, 3) dampak negatif dan signifikan, juga 4) dampak negatif namun tidak signifikan (Purba et al., 2021).

Model regresi linear berganda ditunjukkan untuk kasus, rumus yang terbentuk adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = Tingkat Pengangguran
A = Nilai konstanta
 β_1 - β_2 = Koefisien regresi variabel independen
 X_1 = Upah
 X_2 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 ϵ = Komponen pengganggu (error)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda dan hasil uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	108.096	162.313		.666	.574
UMK(X_1)	5.312E-6	.000	1.260	.809	.503
IPM(X_2)	-1.539	2.438	-.982	-.631	.593

a. Dependent Variable: PENGANGGURAN(Y)

Berdasarkan informasi sebelumnya, oleh sebab itu persamaan regresinya adalah pada kolom B yaitu $= 108,096 + 5,312 x_1 - 1,53 x_2$.

- Konstanta sebesar 108,096, perkara ini diartikan jika variabel gaji minimum kabupaten/kota maupun indeks pembangunan manusia bernilai nol, maka prediksi nilai tingkat pengangguran terbuka sebesar 108,096.
- Koefisien variabel x_1 sebesar 5,312, perkara ini diartikan jika variabel upah minimum kabupaten/kota dimajukan sebesar 1 satuan, maka ramalan nilai tingkat pengangguran terbuka akan meningkat sebesar 5,312 satuan, begitu pula sebaliknya jika variabel diturunkan upah minimum kabupaten/kota sebesar 1 satuan, oleh sebab itu ramalan nilai tingkat pengangguran terbuka akan menurun sebesar 5,312 satuan.
- Koefisien variabel x_2 sebesar -1,53, perkara ini diartikan jika variabel indeks pembangunan manusia maju sebesar 1 satuan, maka ramalan nilai tingkat

pengangguran terbuka akan menurun sebesar 1,53 satuan, begitu pula sebaliknya jika variabel indeks pembangunan manusia diturunkan sebesar 1 satuan, maka, maka prediksi nilai tingkat pengangguran terbuka akan meningkat sebesar 1,53 satuan.

1. Pengujian Hipotesis Pertama (H1) Uji t

Berdasarkan nilai Sig. yang diperoleh sebanyak 0,503 yang lebih tinggi dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05 dan nilai t hitung sebanyak 0,809 yang lebih kecil dari nilai t tabel sebanyak 4,303, oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis H1 ditolak. Artinya, tidak ada akibat yang signifikan dari X1 (Upah Minimum Kabupaten/kota) terhadap Y (Pengangguran).

2. Pengujian Hipotesis Kedua (H2) Uji t

Menurut hasil uji signifikansi, didapatkan nilai Sig. untuk akibat X2 (Indeks Pembangunan Manusia) kepada Y (Pengangguran) sebanyak 0,593 yang lebih besar dari level signifikansi 0,05. Selain itu, nilai t hitung -0,631 juga lebih kecil dari t tabel 4,303. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang diartikan tidak ada akibat signifikan dari X2 (Indeks Pembangunan Manusia) kepada Y (Pengangguran).

Tabel 2. Hasil uji f
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.028	2	.514	.372	.729 ^b
Residual	2.767	2	1.384		
Total	3.795	4			

a. Dependent Variable: PENGANGGURAN(Y)

b. Predictors: (Constant), IPM(X2), UMK(X1)

3. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) Uji f

Menurut hasil sebelumnya, diperoleh nilai signifikansi untuk akibat X1 (Upah Minimum Kabupaten/kota) dan X2 (Indeks Pembangunan Manusia) terhadap Y (Pengangguran) sebagai bersama-sama sebesar $0,729 > 0,05$ dan nilai F hitung $0,372 < F$ tabel 9,55. Maka, dapat dikomentari bahwa hipotesis H3 ditolak, yang diartikan tidak

ada akibat yang signifikan antara X1 (Upah Minimum Kabupaten/kota) dan X2 (Indeks Pembangunan Manusia) secara bersama-sama kepada Y (Pengangguran).

Tabel 3. Hasil uji koefisien determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.520 ^a	.271	-.458	1.17628

a. Predictors: (Constant), IPM(X2), UMK(X1)

4. Koefisien Determinasi

Menurut hasil sebelumnya Didapati nilai R Square sebesar 0,271, hal ini dapat diartikan bahwa akibat variabel X1 (Upah Minimum Kabupaten/kota) dan X2 (Indeks Pembangunan Manusia) secara simultan terhadap variabel Y (Pengangguran) adalah sebesar 2,71%. Sedangkan 97,29% diterangkan oleh variabel lain diluar variabel yang dianalisis dalam riset ini.

Menurut hasil olah data yang sudah dilaksanakan sebelumnya, oleh sebab itu didapati beberapa output yaitu sebagai berikut:

1. Akibat Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran

Menurut hasil pengujian signifikansi, dapat disimpulkan bahwa pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran tidak signifikan. Uji koefisien regresi parsial menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,503, yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, meskipun upah minimum mengalami kenaikan atau penurunan, hal tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran, meskipun ada dampak positif dimana peningkatan upah minimum dapat meningkatkan tingkat pengangguran dan sebaliknya, penurunan upah minimum dapat menurunkan tingkat pengangguran. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis bahwa upah minimum memiliki pengaruh terhadap

pengangguran. Padahal secara teori, semakin tinggi upah minimum, semakin banyak pekerjaan yang terserap, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat pengangguran. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Fina et al., 2021) yang menunjukkan bahwa upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

2. Akibat Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran

Menurut hasil pengujian signifikansi, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara indeks pembangunan manusia dengan tingkat pengangguran. Uji koefisien regresi parsial (Uji T) menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,593 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun memiliki pengaruh negatif terhadap pengangguran, hubungan antara indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran bersifat tidak signifikan. Dalam hal ini, jika indeks pembangunan manusia meningkat, tingkat pengangguran cenderung menurun, dan sebaliknya jika indeks pembangunan manusia menurun, tingkat pengangguran cenderung meningkat. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Maulana et al., 2022) pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten yang terdiri dari 8 Kabupaten/Kota.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari riset yang telah di laksanakan dapat di simpulkan bahwa :

1. Dari pengujian hipotesis pertama mengenai pengaruh upah minimum pada tingkat pengangguran, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat upah minimum maupun tingkat pengangguran di wilayah distrik/kota Provinsi Banten.
2. Dalam pengujian hipotesis kedua tentang akibat indeks pembangunan manusia kepada tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota provinsi banten

disimpulkan melalui pengujian bahwa tidak adanya korelasi antara indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka.

3. Dalam uji Hipotesis ketiga, yang memeriksa bagaimana upah minimum dan indeks pembangunan manusia mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di kabupaten atau kota Provinsi Banten, menyimpulkan bahwa tidak ada korelasi diantara dua variabel ini.
4. Berdasarkan hasil pengujian dari tiga hipotesis di atas, dinyatakan bahwa hubungan antara ketiga variable sangat kecil dan hampir tidak ada hubungan. Namun perlu di lakukan pengujian lebih lanjut tentang permasalahan pengangguran di wilayah provinsi banten.

Berdasarkan kesimpulan dan hasil pengujian yang telah di laksanakan, maka penulis memberikan saran kepada pemerintah ataupun para pembaca di antaranya :

1. Di perlukan pengujian dan penelitian yang lebih rinci tentang permasalahan pengangguran yang terjadi di provinsi Banten, di perlukan peranan pemerintah dan para ahli untuk mengatasi permasalahan pengangguran terbuka di wilayah Banten.
2. Di karenakan tidak adanya hubungan antara ketiga variable tersebut dapat juga di simpulkan bahwa tingkat indeks pembangunan manusia yang terdapat di wilayah Banten terbilang kecil, sehingga tidak ada hubungan antara variable tersebut dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di wilayah banten. Pemerintah Kembali harus turut andil dalam permasalahan ini. Perlunya peran pemerintah dalam membangun sarana dan prasarana yang dapat mendorong dan meningkatkan tingkat indeks pembangunan manusia di wilayah Banten.

DAFTAR REFERENSI

Agus Yulistiyono, Endra Gunawan, T. W., Tekni, H. Firmansyah. N. A. Malau., Megaster, A. E. T. P. T., Nurhayati. Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, S., Susilo Setyawan Nugroho Sumarjiyanto, S., Orba Mamallang Septina Dwi Retrandari, S., Nawatmi, Caroline Agung Nusantara, S. nowat, & Hikmah, N. I. (2021). *Bonus*

demografi sebagai peluang indonesia dalam percepatan pembangunan ekonomi
(B. Malau Nugraha Parada, Ed.; 1st ed.). Insania.

Badan Pusat Statistik. (2021).

[https://www.bps.go.id/subject/6/tenagakerja.html#:~:text=TPT%20\(Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka\)%20adalah,kurang%20dari%2035%20jam%20seminggu](https://www.bps.go.id/subject/6/tenagakerja.html#:~:text=TPT%20(Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka)%20adalah,kurang%20dari%2035%20jam%20seminggu)).

Baeti, N. (2013). PENGARUH PENGANGGURAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3), 85–98.

Dita Dewi Kuntiarti. (2018). PENGARUH INFLASI, JUMLAH PENDUDUK DAN KENAIKAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2010-2015. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 7(1), 1–9.

Filiarsari, A., & Setiawan, A. H. (2021). PENGARUH ANGKATAN KERJA, UPAH, PDRB, DAN PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2002-2019. *Diponegoro Journal of Economics*, 10(2), 1–10.

Fina, E., Walewangko, E. N., & Tumangkeng, S. Y. L. T. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(02), 180–190.

Konoras, I. K., Wagiran, T. A., & Mukhlis, S. (2018). Problematika Pemerintah Dalam Menyongsong Bonus Demografi Di Indonesia. *Potret Pemikiran*, 22(2).
<https://doi.org/10.30984/pp.v22i2.784>

Mahroji, D., Ekonomi, J., Stie, P., & Madania, P. (2019). *PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI BANTEN*. 9(1). <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/>

Maulana, B. fakhri, Farhan, M., & Desmawan, D. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Banten Tahun 2017-2020. *Ebismen: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 1(1), 123–134.

Nuradila, R. F., & Wibowo, R. A. (2018). Tax Minimization sebagai Pemoderasi Hubungan antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Convenant

dengan Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(1), 69. <https://doi.org/10.22515/jifa.v1i1.1135>

Prawira, S. (2018). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM PROVINSI, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA. *EcoGen*, 1(1), 162–168.

Purba, D. S., Tarigan, W. J., Sinaga, M., & Tarigan, V. (2021). Pelatihan Penggunaan Software SPSS Dalam Pengolahan Regressi Linear Berganda Untuk Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Karya Abadi*, 5(2), 206.

Sadono Sukirno. (2012). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Raja Grafindo Persada.

Saeful Bahari, I. (2020). *PERLINDUNGAN UPAH BAGI PEKERJA BADAN USAHA MILIK DESA* (1st ed.). BAHASA RAKYAT.